

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BRMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh

Rita Putri Wulandari¹, Rita Dwi Putri², Lili Wahyuni³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Kampus I: Jalan Jenderal Sudirman, No. 6, Kota Solok.

Kampus II: Jalan. Tembok, Ampang Kualo, Nan Balimo, Kota Solok.

Email : ¹ritaputri.wulandari@gmail.com, ²ritadwiputri02@gmail.com,
³lili.maksi@yahoo.co.id,

Article History:

Received: 06-09-2022

Revised: 16-09-2022

Accepted: 20-10-2022

Keywords:

Motor Vehicle Tax, Transfer Fee for Motor Vehicles, Regional Original Revenue

Abstract: *This study aims to determine the effect of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee on Regional Original Income in West Sumatra Province in 2012 - 2021. The type of data used is secondary data in the form of realization of motor vehicle tax receipts, transfer fees for motorized vehicles and regional original income for the period 2012 - 2021. The sample in this study uses total sampling. The analysis used includes normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, hypothesis testing, and coefficient of determination R square.*

The results of this study indicate that (1) Motor Vehicle Tax has an effect on Regional Original Income. This is evidenced by the value of t arithmetic $10,066 > t$ table $1,895$ while for significance $0,000 < 0,05$. (2) The Transfer Fee for Motor Vehicles does not affect the Regional Original Revenue. This is evidenced by the value of t arithmetic $1,329 < t$ table $1,895$, while for significance $0,220 > 0,05$. (3) Motorized Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fees simultaneously affect Regional Original Income. This is evidenced by the calculated F value $50,745 > F$ table $4,737$ with a significance of $0,000 < 0,05$.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ketahun.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini pemerintah termotivasi untuk melakukan perubahan di berbagai sektor untuk meningkatkan pendapatan negara yang berguna untuk membiayai pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah memiliki tujuan yang bermanfaat bagi perkembangan suatu negara. Tujuan otonomi daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam mewujudkan otonomi daerah, maka perlu adanya usaha-usaha nyata dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah otonom. Usaha tersebut dapat dicapai dengan cara setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki.

LANDASAN TEORI

1. Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Resmi (2017:1) mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin "*surplus*"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Selain itu, Mardiasmo (2018:3) mengatakan pajak merupakan premi yang harus dibayar oleh masyarakat ke kas negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kemakmuran rakyat.

2. Pajak Daerah

Mardiasmo (2018:14) mengatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sementara itu didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Marihot (2013:176) menjelaskan lebih lanjut mengenai pemungutan PKB yang dapat disesuaikan dengan kebijakan dan atau peraturan di masing-masing daerah. Pemungutan PKB didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pengenaan PKB Pada dasarnya tidak mutlak diterapkan pada seluruh daerah provinsi yang ada di indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi, karena itu dapat dipungut pada suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB Di daerah provinsi yang bersangkutan.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sebuah proses pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke pemilik kedua, dan seterusnya. Pengalihan nama tersebut dilakukan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Petunjuk Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Proses balik nama motor diperlukan agar tidak repot saat akan melakukan perpanjangan STNK serta dokumen penting lainnya. Adapun biaya balik nama motor yang perlu disiapkan adalah untuk pembayaran administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, biaya administrasi dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Pajak Kendaraan Bermotor, hingga penerbitan Buku Petunjuk Pemilik Kendaraan Bermotor baru. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor. Dan bukti pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pasal 1 angka 20 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggoro (2017:18) mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah harus memaksimalkan pendapatan daerah. Memaksimalkan PAD dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD mampu untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis (statistik) terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner,

jejak pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis (dugaan sementara) yang diajukan dalam penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sugiarto (2017:87) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Dengan kata lain bahwa data tersebut sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya sebagai tambahan informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data sekunder instansi yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan, data ini di ambil dari laporan realisasi penerimaan tahunan dari instansi yang akan diteliti.

4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu data laporan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 10 tahun periode 2012-2021. Dengan jumlah seluruh data adalah 30 data. Adapun teknik sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *total sampling*. *Total sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel, yaitu data laporan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat selama 10 tahun periode 2012-2021. Dengan jumlah seluruh data adalah 30 data.

5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Berdasarkan uraian diatas variabel penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen disebut juga variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini diberi notasi X, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen disebut juga variabel terikat, yaitu yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

6. Teknik Analisis Data

Moleong (2018:280) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dengan kata lain analisis data penelitian merupakan bagian

dari proses pengujian data setelah tahap pemeliharaan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22 yaitu suatu program komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data statistik.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalisasi bertujuan untuk apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan peneliti menggunakan uji statistik *kolmogorov-smirnov*. Uji *kolmogorov-smirnov* adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Jika data berdistribusi normal, maka uji statistik data penelitian valid dan jika data tidak berdistribusi normal, maka uji statistik data penelitian tidak valid.

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018:107) menjelaskan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan *variance inflation faktor (VIF)*. Apabila nilai $VIF > 10$, terjadi multikolinearitas. Jika $VIF < 10$ tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ghozali (2018:137) mengatakan bahwa jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan ketika pola data bersifat *time series*. Model regresi yang baik harus bebas dari asumsi autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistik Durbin-Watson. Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak variabel lagi di antara variabel independen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Priyastama (2017:154) mengatakan bahwa regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda, persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Uji Hipotesis

Ghozali (2018:44) mengatakan bahwa uji hipotesis digunakan untuk membuktikan atau memperjelas dari tujuan semula yaitu apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Ghozali (2018:179) menyatakan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (5%) untuk *degree of freedom* (df) = n - k. Uji ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan;

- a. Jika nilai $|t \text{ hitung}| \geq t \text{ tabel}$ atau $t \text{ signifikan} < 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $|t \text{ hitung}| \leq t \text{ tabel}$ atau $t \text{ signifikan} > 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Ghozali (2018:179) menyatakan uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikan pada level $\alpha = 0,05$ untuk *degree of freedom* (df) = n - k - 1. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan F_{hitung} dengan ketentuan :

- a. Jika nilai $|F \text{ hitung}| \geq F \text{ tabel}$ dan $F \text{ sig} < 0,05$ maka Hipotesis diterima.
- b. Jika nilai $|F \text{ hitung}| \leq F \text{ tabel}$ dan $F \text{ sig} > 0,05$ maka hipotesis tidak dapat diterima.

Uji Koefisien Determinasi R Square

Ghozali (2018:97) menyatakan bahwa koefisien determinasi R Square (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Apabila teknik analisa datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas maka kita menggunakan R square, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua variabel maka akan lebih baik menggunakan *adjusted R square* yang nilainya selalu lebih kecil dari R square. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan R Square, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu variabel yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Tabel 4.4
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001047
	S td. Deviation	112612758328.34973000
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.170
	Negative	-.178
Test Statistic		.178
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test pada tabel 4.4 yang telah disajikan di atas, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah sebesar $0,200 > 0,05$ yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Data variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) serta variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y) dalam penelitian ini, memenuhi uji normalitas, dan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Kendaraan Bermotor	.992	1.008
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	.992	1.008

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22*

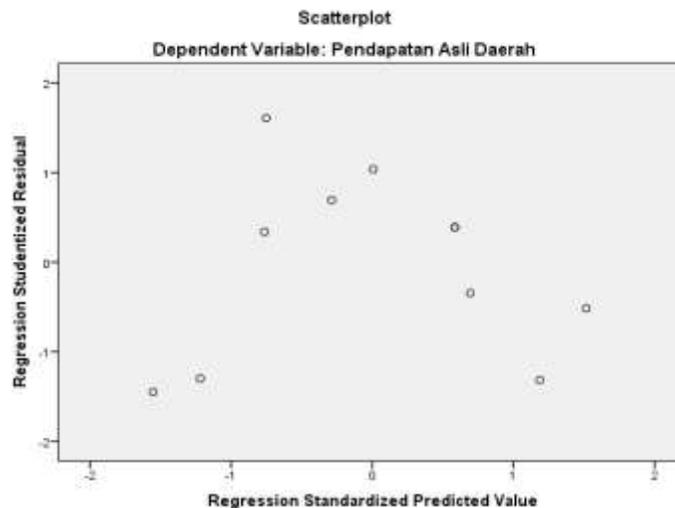
Berdasarkan tabel 4.5 yang telah disajikan diatas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* dan VIF, jika nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan VIF < 10, maka dinyatakan tidak ada multikolonieritas dalam model regresi. Sedangkan, jika nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF > 10, maka dinyatakan ada gejala multikolonieritas dalam model regresi. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

- a. Nilai *tolerance* variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) 0,992 > 0,10 dan nilai VIF 1.008 < 10
- b. Nilai *tolerance* variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) 0,992 > 0,10 dan nilai VIF 1.008 < 10

Seluruh nilai *tolerance* besar dari 0,10 dan nilai VIF seluruh variabel kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa masing – masing variabel tidak ada gejala multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot* pada gambar 4.1 yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Artinya yaitu X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) dan X2 (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) tidak terdapat kesamaan pada varian errorya.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.963 ^a	.927	.909	125904891377 .973	2.658

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 diatas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 2,658. Selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson pada tabel dengan signifikansi 5%. Adapun jumlah variabel independen dalam penelitian ini adalah 2 dan jumlah sampel adalah 10 maka didapat nilai dL sebesar 0,6972 dan nilai dU sebesar 1,6413. Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,658 lebih besar dari dU yakni 1,6413 dan nilai ini kurang dari (4-dU) atau $4 - 1,6413 = 2,3587$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, $1,6413 < 2,658 < 2,3587$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-	418982575710		-0.762	.468
		319416590035 .583	.582			
	Pajak Kendaraan Bermotor	3.239	.322	.966	10.066	.000
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.239	.932	.128	1.329	.220

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda pada tabel 4.7 diatas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 319416590035,583 + 3,239 X_1 + 1,239 X_2 + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka hasil koefisien regrasi dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstant sebesar 319.416.590.035,583 menyatakan bahwa jika nilai variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) dianggap nol (0) maka nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 319.416.590.035,583. Dengan kata lain bahwa pada saat variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat sebesar 319.416.590.035,583 rupiah dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.
2. Nilai koefisien regresi dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 3,239 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 3,239. Hal ini berarti apabila variabel independen Pajak Kendaraan Bermotor (X1) naik sebesar 1 rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 3,239 rupiah.
3. Nilai koefisien regresi dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1,239 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 1,239. Hal ini berarti apabila variabel independen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) naik sebesar 1 rupiah dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,239 rupiah.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan test signifikansi 0,05 dan untuk *degree of freedom* (df) = n-k.

Tabel 4.8
Hasil Uji
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-319416590035.583	418982575710.582		-.762	.468
Pajak Kendaraan Bermotor	3.239	.322	.966	10.066	.000
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.239	.932	.128	1.329	.220

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8 di atas, diperoleh t hitung dari masing-masing variabel bebas. Selanjutnya t hitung penelitian dibandingkan dengan t tabel dengan tingkat

signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = $n - k$, $10 - 3 = 7$ diperoleh t tabel = 1,895. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian untuk variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) diperoleh t hitung $10,066 > t$ tabel 1,895 sedangkan untuk signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian untuk variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) diperoleh t hitung $1,329 < t$ tabel 1,895 sedangkan untuk signifikansi $0,220 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini berarti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Uji F

Tabel 4.9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16088245622	2	804412281143	50.745	.000 ^b
		86591600000 000.000		295800000000 .000		
	Residual	12681633338	8	158520416728		
		31928300000 00.000		99103000000. 000		
	Total	17356408956	10			
		69784400000 000.000				

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa F hitung 50,745 > F tabel 4,737 dengan signifikansinya $0,000 < 0,05$, artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Koefisien Determinasi R Square

Berikut ini tabel hasil koefisien determinasi antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.963 ^a	.927	.909	1259048913 77.973	2.658

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.10 diatas, diperoleh angka *R Square* sebesar 0,927 atau 92,7%. Hal ini berarti 92,7% sumbangan pengaruh variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya 7,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Variabel lain yang mempengaruhi seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pajak provinsi, sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Pada penelitian ini mendapatkan hasil analisis hipotesis (H1) diterima, sehingga Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai hasil uji t hitung $10,066 > t$ tabel 1,895 dan nilai Sig t sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05.

Adanya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan adanya peran aktif dari Pemerintah Provinsi yang terus berupaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat terutama keluhan terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor seperti adanya pemutihan pajak, Samsat keliling, Gerai Samsat, Samsat Drive-Thru, E-Samsat dan lain-lain. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang telah disediakan tersebut, penerimaan penghasilan dari Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat rata-rata setiap tahunnya meningkat dan bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Meningkatnya pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor maka Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat juga ikut meningkat. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan kemandirian daerah Provinsi Sumatera Barat dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Natalia Ester Rompis, dkk (2015), Margaretha Anggraini, dkk (2015), Musdalifah (2020), Niken Anggraini (2020), Novia Larashati (2020) serta Djodi Setiawan dan Mia Isporima (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Jumardi Amir (2015) menunjukkan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial tidak berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yani Rizal dan Miftahul Hidayah (2018) memberikan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil analisis hipotesis (H2) ditolak, sehingga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai hasil uji t hitung $1,329 < t$ tabel $1,895$, dan nilai Sig t sebesar $0,220$ lebih besar dari $0,05$. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Anggraini, dkk (2015), Septiana Widya Ningsih dan Anim Rahmayati (2018) dan Novia Larashati (2020) yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana terjadi peningkatan dan penurunan serta terhitung kecil dan tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut dikarenakan adanya masyarakat yang membeli kendaraan bekas tidak melakukan perubahan terhadap kepemilikan kendaraannya. Sehingga penggunaan kendaraan bermotor luar daerah semakin meningkat, (m.antarnews.com, 2022). Adanya beberapa objek pungutan yang belum dapat terjangkau disebabkan dari landasan peraturan yang tidak memungkinkan untuk mengenakan pungutan terhadap objek pajak kendaraan bermotor luar daerah yang secara nyata-nyata telah dikuasai atau dimiliki dan beroperasi diwilayah Provinsi Sumatera Barat. Namun penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Nurul Aliyah (2019) dan Niken Anggraini Pangesti (2020), menunjukkan hasil penelitian bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis data prolehan F hitung $50,745 > F$ tabel $4,737$ dengan signifikansinya $0,000 < 0,05$, artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian Nurul Aliyah (2019) dan Ferdiansyah (2020) yang menunjukkan hasil analisis bahwa secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sumbangan secara serentak antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat sebesar $92,7\%$ sedangkan sisanya $7,3\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dengan demikian semakin tinggi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka akan menyebabkan peningkatan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Rina Widya (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara

simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bermotor mereka, dengan demikian tentunya akan mempengaruhi tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Novi Indriani (2018) menunjukkan hasil bahwa kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah dinilai sangat kurang berkontribusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2012 - 2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian untuk variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) diperoleh t hitung $10,066 > t$ tabel $1,895$ sedangkan untuk signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil pengujian untuk variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) diperoleh t hitung $1,329 < t$ tabel $1,895$, sedangkan untuk signifikansi $0,220 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini berarti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung $50,745 > F$ tabel $4,737$ dengan signifikansinya $0,000 < 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
4. Nilai R Square sebesar $0,927$ atau $92,7\%$ hal ini berarti $92,7\%$ sumbangan pengaruh variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya $7,3\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

1. Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Sumatera Barat periode 2021 - 2026 yang harus dapat diselesaikan dengan sisa waktu 3,5 tahun, maka perlu usaha nyata dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan daerahnya. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang berpengaruh berasal dari pajak daerah. Pajak daerah contohnya dapat berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan penggalan potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang maksimal akan dapat meningkatkan penerimaan dalam bidang tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah, hal ini juga akan memberikan pengaruh dan

- peningkatan pada Pendapatan Daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel indenpenden lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir, Jumardi dkk. (2014). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Fakultas konomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [2] Anggraini, Margaretha dkk.(2014).Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. E-Jurnal Akuntansi, STIE MDP Palembang.
- [3] Aliah, Nurul dkk.(2019).Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Aceh.E-Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. Vol 6, Nomor 1.
- [4] Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian. Rineka Cipta.
- [5] Bapenda Provinsi Sumatera Barat. (2022). Rapat Koordinasi Formulasi Strategi Pencapaian Target Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun 2022.Diakses dari <https://bapenda.sumbarprov.go.id/>.Tanggal 5 Juni 2022.
- [6] Deepublish.(2021). Cara menyusun Proposal Skripsi yang Baik dan Benar. Diakses 7 Desember 2021, dari <https://penerbitbukudeepublish.com/cara-menyusun-proposal-skripsi/>
- [7] Ferdiansyah. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi. Vol 4, Nomor 2.
- [8] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Universitas Diponegoro.
- [9] Kementerian Keuangan. (2019). Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [10] Larashati, Novia. (2021). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- [11] Kurniawan, A. W. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Pandiva Buku.
- [12] Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- [13] Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- [14] Marihot, P. S. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajagrafindo Persada.
- [15] Marihot, P. S. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers.
- [16] Marsyahrul, Tony. (2004). Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. Jakarta: Gramedia.
- [17] Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revi). PT. Remaja Rosdakarya.

- [18] Musdalifah.(2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah UPT Pendapatan Wilayah GowaSkripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [19] M.antarnews.com. (2022).Sumbang Dongkrak Pendapatan Daerah Dengan Turun ke Jalan. Diakses.dari <https://m.antarnews.com/berita/>.Tanggal 21 Juni 2022.
- [20] Panjaitan, Nora Januarti dkk.(2018). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah.E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Politeknik Bisnis Indonesia.
- [21] Pangesti, Niken Anggraeni. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal.
- [22] Peraturan Gubernur Sumatera Barat. (2020). Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Diakses dari <https://ppid.sumbarprov.go.id/> Tanggal 1 Agustus 2022.
- [23] Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat.
- [24] Rizal, Yani dan Miftahul Hidayah. (2018).Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis 9 (1), 84-91.
- [25] Rompis, Natalia Ester. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, Nomor 4.
- [26] Sekaran, Uma dan Roger Bougie.(2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis.Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- [27] Setiawan, Djodi dan Mia Isporima.(2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.Jurnal JISIPOL, Vol. 5, Nomor 3.Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung.
- [28] Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id//>. Tanggal 10 Juli 2022.
- [29] Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2014).Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172, Vol. 2, Hal: 70-79.
- [30] Widya, Rina. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Sumbangan Pihak Ketiga Dealer terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada UPPD Marabahan.E-Journal, Vol 16, Nomor 3.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN